



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Pidato Pengukuhan Profesor

# Kelembagaan Sebagai Pilar Kesejahteraan dan Keadilan dalam Transformasi Ekonomi Global dan Ekonomi Syariah

Prof. Dr. **Unggul Priyadi**, M.Si.

Profesor Bidang Ilmu Ekonomi Kelembagaan  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

12 Syakban 1446/  
11 Februari 2025

Pidato Pengukuhan Profesor

**KELEMBAGAAN SEBAGAI PILAR  
KESEJAHTERAAN DAN KeadILAN  
DALAM TRANSFORMASI  
EKONOMI GLOBAL DAN  
EKONOMI SYARIAH**

**Prof. Dr. Unggul Priyadi, M.Si.**  
Profesor Bidang Ilmu Ekonomi Kelembagaan  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

12 Syakban 1446/11 Februari 2025

**Bismillahirrahmaanirrahiim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Yang saya hormati:

1. Ketua Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia
2. Ketua dan Anggota Senat Universitas Islam Indonesia
3. Ketua dan Anggota Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia
4. Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia
5. Jajaran Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia
6. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia
7. Para Undangan Terhormat, Keluarga, Sejawat, dan Hadirin

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, dan Maha Pengatur kehidupan, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman, amiin.

Dalam momen yang penuh berkah ini, izinkanlah saya mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada senat Universitas Islam Indonesia serta seluruh hadirin yang berkenan menghadiri pidato pengukuhan sebagai Profesor pada rumpun Ilmu Ekonomi Kelembagaan dengan judul:

## **“Kelembagaan sebagai Pilar Kesejahteraan dan Keadilan dalam Transformasi Ekonomi Global dan Ekonomi Syariah”**

Di dalam samudra perjalanan kehidupan, kelembagaan berperan sebagai mercusuar yang menuntun arah dan menjernihkan tujuan, yang membawa kemakmuran serta keadilan bersama. Dalam Ekonomi Islam, kelembagaan bukan sekadar struktur formal, tetapi sebuah paradigma kokoh yang menopang kemakmuran dan keadilan. Ketika kelembagaan bergerak selaras dengan nilai-nilai *Ilahiyah*, sesuai *maqashid syari'ah*, maka hal tersebut akan menjadi mukjizat yang menggerakkan perubahan dari kegelapan kepada cahaya, dari keterbatasan menuju keberkahan yang berlimpah.

Dengan demikian, materi yang akan saya sampaikan ini bukan sekadar serangkaian pemikiran akademis, melainkan gagasan yang bertujuan untuk menginspirasi transformasi mendalam dalam ekonomi global dan ekonomi syariah, menjadikan setiap kelembagaan sebagai pilar yang kokoh bagi kemakmuran dan keadilan bersama. Semoga Allah Swt., memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan amanah yang mulia ini.

### **Hadirin yang saya hormati,**

Peran kelembagaan mengatur kehidupan ekonomi menjadi penting, dalam upaya menciptakan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang memberikan dasar etika kuat untuk pembangunan kelembagaan yang berfungsi sebagai pilar kesejahteraan dan keadilan. Dalam konteks ekonomi global dan ekonomi syariah, prinsip amanah dan keadilan

memastikan bahwa sumber daya dikelola secara bertanggung jawab, hukum ditegakkan dengan adil, dan distribusi kekayaan dilakukan secara merata. Implementasi prinsip-prinsip kelembagaan adalah kunci untuk mencapai transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kedudukan sebagai dosen yang salah satu tugas utamanya melakukan penelitian maka mengupayakan berkontribusi berbagai aspek ekonomi kelembagaan dan terapan. Kegiatan penelitian ini didorong oleh komitmen untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan dan ekonomi kelembagaan dapat dioptimalkan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran yang merata.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, akan diulas beberapa topik dalam rumpun keilmuan ekonomi kelembagaan.

## **Aspek Ekonomi Global**

### **1. Penguatan Kelembagaan**

Penguatan kelembagaan dalam konteks ekonomi kelembagaan merujuk pada upaya untuk memperbaiki, memperkuat, dan menstabilkan struktur serta aturan yang mengatur interaksi ekonomi dalam suatu masyarakat. Hal ini mencakup pembentukan dan pengembangan institusi-institusi politik, hukum, serta ekonomi yang efektif dan adil. Institusi yang kuat dapat membantu menjamin hak-hak properti, menegakkan kontrak, dan memfasilitasi pasar yang efisien, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan (Priyadi, 1994).

Institusi memainkan peran penting dalam menurunkan biaya transaksi, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan kepercayaan (Mohamed et al., 2019).

Institusi membentuk insentif bagi individu dan organisasi, mempengaruhi keputusan ekonomi, serta berkontribusi pada stabilitas sosial dan politik. Institusi yang baik mampu menciptakan kerangka kerja yang mendorong kebijakan ekonomi yang efektif dan inovasi.

Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James Robinson menerima penghargaan Nobel Laureate 2024 *Economic Sciences*, atas studi mereka yang mendalam mengenai pembentukan institusi dan pengaruhnya terhadap kemakmuran. Mereka menyatakan kualitas institusi merupakan faktor penentu utama dalam menentukan perbedaan kemakmuran antar negara. Salah satu karyanya dalam buku "***Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty***" menyoroti pentingnya institusi dalam menjelaskan perbedaan kekayaan dan kemiskinan di berbagai negara. Mereka berargumen bahwa institusi politik dan ekonomi yang inklusif menjadi kunci keberhasilan ekonomi (Robinson & Acemoglu, 2012; The Prize in Economic Sciences, 2024).

Institusi dibedakan secara inklusif dan ekstraktif. Institusi inklusif mendorong partisipasi dan distribusi kekuasaan secara luas, sedangkan institusi ekstraktif memusatkan kekuasaan dan sumber daya dalam tangan segelintir orang. Dalam perspektif ketimpangan, kondisi tersebut menjadikan pemusatan pengelolaan sumber daya alam hanya pada sekelompok orang dan implikasinya akan tercipta ketimpangan pendapatan antar wilayah provinsi atau kabupaten. Sebagai ilustrasi kondisi ketimpangan pendapatan antar wilayah ditunjukkan dalam tabel berikut:

<b>Provinsi</b>	<b>Perkotaan</b>	<b>Pedesaan</b>	<b>Perkotaan dan Perdesaan</b>
Aceh	0,325	0,258	0,294
Sumatera utara	0,325	0,230	0,297
Sumatera barat	0,310	0,228	0,283
Riau	0,345	0,267	0,307
Jambi	0,360	0,288	0,321
Sumatera selatan	0,352	0,305	0,333
Bengkulu	0,413	0,275	0,342
Lampung	0,323	0,275	0,302
Kep. Bangka belitung	0,263	0,196	0,244
Kep. Riau	0,351	0,240	0,349
D.K.I. jakarta	0,423	-	0,423
Jawa barat	0,434	0,325	0,421
Jawa tengah	0,399	0,310	0,367
D.I. Yogyakarta	0,440	0,349	0,435
Jawa timur	0,387	0,325	0,372
Banten	0,357	0,254	0,353
Bali	0,364	0,287	0,361
Nusa tenggara barat	0,383	0,326	0,361
Nusa tenggara timur	0,281	0,305	0,316
Kalimantan barat	0,340	0,259	0,310
Kalimantan tengah	0,311	0,288	0,301
Kalimantan selatan	0,329	0,255	0,302
Kalimantan timur	0,325	0,289	0,321

<b>Tabel Lanjutan</b>			
Kalimantan utara	0,258	0,273	0,264
Sulawesi utara	0,364	0,334	0,360
Sulawesi tengah	0,340	0,259	0,301
Sulawesi selatan	0,373	0,325	0,363
Sulawesi tenggara	0,392	0,330	0,370
Gorontalo	0,397	0,408	0,414
Sulawesi barat	0,456	0,303	0,354
Maluku	0,277	0,233	0,282
Maluku utara	0,343	0,275	0,316
Papua barat	0,283	0,426	0,389
Papua barat daya	0,266	0,413	0,346
Papua	0,299	0,418	0,362
Papua selatan	0,299	0,435	0,404
Papua tengah	0,270	0,397	0,381
Papua pegunungan	0,224	0,346	0,340

Sumber: BPS (2024)

**Tabel 1.** Perbandingan data *Gini Ratio* di Indonesia per Provinsi pada tahun 2024 (Semester 1 - Maret)

*Gini Ratio* merupakan ukuran kesenjangan distribusi pendapatan di mana nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna dan nilai 1 menunjukkan ketidaksetaraan sempurna. Secara umum, data menunjukkan bahwa daerah perkotaan memiliki *Gini Ratio* lebih tinggi dibandingkan perdesaan, yang mencerminkan ketidaksetaraan pendapatan lebih besar di perkotaan. Perbedaan nilai *Gini Ratio* antar provinsi di Indonesia menunjukkan dinamika distribusi pendapatan

yang belum sepenuhnya terkonstruksi dengan baik. Salah satu penyebab disparitas pendapatan antar masyarakat adalah lemahnya kualitas kelembagaan yang dimiliki oleh setiap wilayah.

Studi dari Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James Robinson seperti dijelaskan di atas, institusi memainkan peran penting dalam memengaruhi kesejahteraan ekonomi. Institusi yang kuat dapat mengurangi ketidaksetaraan melalui kebijakan redistribusi yang adil, infrastruktur yang baik, serta pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, ketidaksetaraan lebih tinggi di perkotaan yang dicerminkan kebijakan perkotaan yang belum efektif, sementara kesetaraan lebih baik di daerah perdesaan mengindikasikan kebijakan sosial yang lebih adil atau mata pencaharian yang lebih beragam. Provinsi yang berhasil menurunkan Gini Ratio menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi dan kelembagaan mereka berhasil mengurangi ketidaksetaraan. Namun, provinsi dengan ketidaksetaraan tinggi membutuhkan pembaruan institusi, reformasi kebijakan, dan strategi jangka panjang untuk mendukung ekonomi inklusif.

Penguatan kelembagaan memerlukan reformasi yang menjamin berfungsinya institusi secara transparan dan adil. Hal ini juga termasuk dalam membangun kapasitas administratif dan sumber daya manusia yang mampu mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Selain itu, dukungan dari masyarakat dan kesadaran pentingnya institusi merupakan aspek penting dalam proses ini. Dengan demikian, memahami dan memperkuat kelembagaan menjadi pusat perhatian dalam ekonomi kelembagaan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

**Hadirin yang saya hormati,**

## **2. Peran Kelembagaan dalam Ekonomi Pertanian**

Dalam konteks ekonomi pertanian, berbagai kelembagaan pertanian harus bekerja sama dengan penuh integritas, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, untuk memastikan bahwa semua keputusan yang diambil selalu dilakukan dengan niat baik dan demi kebaikan bersama. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Surah Al-Maidah ayat 2 yang menekankan pentingnya kerjasama dalam kebajikan dan menghindari segala bentuk korupsi dan pelanggaran.

Ekonomi kelembagaan mengkaji bagaimana lembaga, aturan mainnya, mempengaruhi perekonomian. Douglas North menyatakan bahwa lembaga mengurangi ketidakpastian dengan membangun struktur yang stabil untuk interaksi manusia (North, 1991). Perspektif ini penting bagi sektor pertanian, di mana ketidakpastian tentang cuaca, hasil panen, dan harga pasar berlimpah.

Unggul Priyadi (2014) menjelaskan fondasi sektor pertanian yang efektif terletak pada kerangka kelembagaannya. Termasuk badan pengatur, undang-undang, dan kebijakan yang dirancang untuk mengawasi praktik pertanian. Namun, keberadaan aturan saja tidak cukup; penegakannya sangat penting. Skandal tersebut menunjukkan bahwa meskipun standar mungkin ada di atas kertas, penegakannya mungkin longgar atau terganggu. Menanggapi masalah pupuk substandar, Kementerian Pertanian telah mengambil langkah-langkah untuk menonaktifkan pejabat yang terlibat dan memasukkan perusahaan-perusahaan tertentu ke dalam daftar hitam. Meskipun ini merupakan tindakan yang diperlukan, tindakan tersebut harus menjadi bagian dari

strategi yang lebih luas untuk memperkuat integritas kelembagaan. Hal ini melibatkan:

1. Penetapan standar yang jelas dan dapat ditegakkan
2. Memperkuat mekanisme pengawasan
3. Meningkatkan akuntabilitas

Ekonomi kelembagaan juga menyelidiki perilaku pasar dan insentif. Dalam konteks skandal pupuk, beberapa insentif ekonomi mungkin telah memengaruhi perilaku pejabat dan perusahaan yang terlibat. Bagi pejabat, insentif dapat mencakup keuntungan moneter atau bentuk korupsi lainnya. Bagi perusahaan, insentifnya adalah meminimalkan biaya, bahkan jika itu berarti melanggar standar. Untuk menangkal insentif ini, reformasi kelembagaan dapat memperkenalkan insentif untuk kepatuhan: Memberikan insentif positif untuk kepatuhan dapat menjadi efektif. Meskipun lembaga formal sangat penting, lembaga informal, norma sosial, nilai, dan praktik budaya, juga secara signifikan memengaruhi perilaku ekonomi. Di banyak masyarakat pedesaan, lembaga informal berperan dalam penyebaran masukan dan praktik pertanian. Petani sering kali mengandalkan jaringan dan norma lokal.

### a. Inovasi Kelembagaan: Studi Kasus Pabrik Gula Madukismo

Tahun	TR KSU			TR Kemitraan		
	Luas Lahan (ha)	Produksi (ku)	Produksi per ha (ku)	Luas Lahan (ha)	Produksi (ku)	Produksi per ha (ku)
1998	-	-	-	3345,81	2638684	78865,33
1999	146,08	130141	89088,86	2983,85	1434475	48074,64
2000	230,6	208664	90487,42	3311,19	2046785	61814,18
2001	114,01	89768	78736,95	3033,97	1740318	57361,08
2002	146,79	139321	94911,78	3132,78	1695120	54109,13
2003	194,5	167302	86016,45	2989,55	1671087	55897,61
2004	116,67	110296	94536,73	2583,79	1411059	54611,98
2005	166,77	139533	83667,93	2636,21	1590862	60346,56
2006	309,11	255034	82505,90	2538,38	1357066	53461,89
2007	336,59	295847	87895,36	2563,43	1597194	62306,91

Sumber: Priyadi (2008)

**Tabel 2.** Luas Lahan dan Produksi Tebu yang Tergabung dalam Inovasi Kelembagaan PG Madukismo

Inovasi kelembagaan di Pabrik Gula Madukismo berpengaruh besar terhadap pelaksanaan usahatani tebu di Yogyakarta. Sebagai pilar ekonomi lokal, pabrik ini tidak hanya bertanggung jawab pada produksi gula tetapi juga pada keberlanjutan usahatani tebu. Inovasi kelembagaan dapat berarti pendekatan baru dalam manajemen, teknologi, dan interaksi dengan petani tebu yang dijelaskan oleh Unggul Priyadi (2008).

Berikut adalah beberapa cara di mana inovasi kelembagaan berperan, serta solusi yang dapat diimplementasikan:

1. Implementasi manajemen yang lebih efektif termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan kinerja usahatani tebu menjadi garansi bagi keberhasilan inovasi kelembagaan.
2. Pembentukan forum komunikasi yang rutin antara pengelola pabrik dan kelompok tani untuk mendiskusikan masalah dan mencari solusi bersama serta program kemitraan yang saling menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Inovasi kelembagaan di Pabrik Gula Madukismo memainkan peran kunci dalam mendukung pelaksanaan usahatani tebu melalui manajemen yang baik, penggunaan teknologi modern, dan kerjasama dengan petani. Produktivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi pabrik dan petani tebu.

**Hadirin yang saya hormati,**

### **3. Peran Kelembagaan dalam Sektor Pariwisata**

Sektor pariwisata dapat memanfaatkan prinsip ini dengan memperkenalkan keindahan alam dan budaya, yang pada akhirnya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, dan peran kelembagaan sangat penting dalam pengelolaan sektor ini. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Mulk ayat 16 yang mendorong umat manusia untuk melakukan perjalanan di muka bumi yang dapat dimaknai sebagai anjuran untuk menjelajahi dan membuka potensi wisata dari berbagai tempat, sebagai sarana bersyukur atas nikmat Allah Swt.

Unggul Priyadi (2016) menjelaskan peranan kelembagaan dalam sektor pariwisata, khususnya pariwisata syariah. Pariwisata syariah menjadi semakin penting dalam memastikan bahwa prinsip maqasid syariah diterapkan pada sektor pariwisata, tujuan-tujuan syariah yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, diterapkan secara holistik. Dalam konteks ini, kelembagaan harus memastikan bahwa destinasi pariwisata syariah memenuhi kriteria keamanan, kenyamanan, dan nilai-nilai Islami.

Nilai-nilai Islami dalam pariwisata itu berusaha untuk mendorong kesadaran dan penghormatan terhadap lingkungan serta keberlanjutan. Pariwisata syariah berupaya mempromosikan praktik yang ramah lingkungan, menekankan kepedulian terhadap alam sebagai ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Selain itu, standar syariah menjamin keamanan dan kenyamanan bagi semua orang, bukan hanya untuk Muslim. Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang tidak hanya menetapkan standar halal, tetapi

juga mencakup aspek keselamatan dengan standar keamanan yang tinggi, kebersihan fasilitas, serta akses yang mudah menuju layanan darurat.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan yang menekankan pentingnya nilai-nilai maqasid syariah dalam pelayanan terhadap wisatawan akan disponsori. Mencakup pelatihan komunikasi yang ramah dan empatik, penghormatan terhadap kebiasaan agama dan budaya wisatawan, serta pemahaman atas aturan syariah dalam layanan sehari-hari. Dari sisi pendanaan, lembaga keuangan akan memberikan dukungan melalui skema pembiayaan berlandaskan syariah yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga selaras dengan prinsip *maqasid* syariah.

**Hadirin yang saya hormati,**

#### **4. Peran Kelembagaan dalam Ekonomi Regional dan Pembangunan Ekonomi**

Lembaga-lembaga yang ada, baik formal maupun informal, memiliki tugas untuk memastikan bahwa sumber daya dikelola dengan baik, kebijakan yang dibuat mendukung kemakmuran masyarakat, dan adanya keadilan serta keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Hud ayat 61 tentang tanggung jawab manusia untuk memakmurkan bumi, yang termasuk di dalamnya adalah peran aktif dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang didasari oleh nilai-nilai ketuhanan dan moral, sebagaimana diingatkan dalam ayat tersebut, diharapkan pembangunan ekonomi dapat

berjalan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang luas.

Dalam ekonomi kontemporer, lembaga memainkan peran penting sebagai landasan kemakmuran dan keadilan (Robinson & Acemoglu, 2012). Lembaga membentuk transformasi ekonomi dengan menyediakan aturan, norma, dan kerangka kerja tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi. Pentingnya lembaga mencakup ekonomi konvensional dan Islam, memengaruhi jalur pembangunan, stabilitas, dan integrasi mereka dalam pasar global. Memahami peran mereka sangat penting untuk memahami bagaimana dinamika regional yang beragam berkembang dan berkontribusi pada gambaran yang lebih besar tentang pembangunan ekonomi baik secara lokal maupun global (Priyadi et al., 2022). Peran ekonomi kelembagaan pada ekonomi regional dan pembangunan penting untuk mengeksplorasi integrasi ekonomi, memastikan keadilan ekonomi melalui prinsip-prinsip Islam, mendorong pembangunan lokal, dan mengatur perdagangan internasional.

Lembaga seperti sistem hukum berupaya mendistribusikan sumber daya dan peluang secara adil, memastikan perlakuan yang adil di berbagai segmen masyarakat. Kerangka hukum dan regulasi yang adil menciptakan lapangan bermain yang setara, penting untuk kesehatan ekonomi dan kohesi sosial yang berkelanjutan (Tarjo et al., 2024).

Interaksi antara tatanan ekonomi global dan lanskap kelembagaan lokal membentuk sejauh mana kawasan dapat memanfaatkan manfaat integrasi ekonomi global. Lembaga internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memainkan peran penting dalam negosiasi dan penegakan perjanjian perdagangan, memastikan

bahwa perdagangan berjalan semulus, sedapat mungkin diprediksi, dan sebebaskan mungkin. Dengan membangun kerangka kerja di mana perdagangan internasional beroperasi, lembaga-lembaga ini menyediakan lingkungan perdagangan yang dapat diprediksi dan stabil yang menguntungkan semua negara anggota.

<b>Peringkat</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Investasi (US \$ Juta)</b>	<b>Jumlah Proyek</b>
1	Jawa barat	2.738,9	8.080
2	Sulawesi tengah	1.742,1	328
3	D.K.I. Jakarta	1.540,1	14.982
4	Jawa timur	1.075,1	3.164
5	Maluku utara	1.025,4	200
6	Banten	1.005,2	3.759
7	Kepulauan riau	548,6	1.547
8	Bali	499,6	15.251
9	Riau	449,1	494
10	Papua tengah	411,3	40
11	Jawa tengah	390,3	2.455
12	Kalimantan timur	320,5	683
13	Kalimantan utara	316,6	95
<b>Tabel Lanjutan</b>			
14	Sumatera selatan	255,5	388
15	Sumatera utara	251,0	994
16	Nusa tenggara barat	163,9	1.426
17	Kalimantan barat	127,3	402
18	Kalimantan selatan	109,2	279
19	Sulawesi tenggara	103,3	164
20	Kalimantan tengah	85,3	338
21	Papua barat	77,6	47

22	Maluku	63,8	46
23	Sulawesi selatan	50,0	459
24	Lampung	49,4	338
25	Jambi	45,8	176
26	Sulawesi utara	41,3	240
27	Nusa tenggara timur	29,8	389
28	Papua selatan	26,5	54
29	Sumatera barat	20,2	282
30	Aceh	15,0	151
31	Papua barat daya	13,3	43
32	Kepulauan bangka belitung	12,6	184
33	Gorontalo	7,2	51
34	Daerah Istimewa Yogyakarta	6,8	385
35	Bengkulu	5,6	70
36	Papua	5,2	61
37	Sulawesi barat	0,6	45

Sumber: Kementerian Investasi/BKPM (2024)

**Tabel 3.** Peringkat Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Berdasarkan Provinsi di Indonesia (Triwulan 1 Tahun 2024)

Adanya perbedaan realisasi PMA antar Provinsi di Indonesia justru menjadi fokus utama untuk membenahi tata kelembagaan secara menyeluruh guna menghindari ketimpangan pembangunan.

Peran Ekonomi Kelembagaan dalam Ekonomi Regional di Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditelaah Unggul Priyadi & Atmadji (2017). Dalam kajiannya menyoroti pentingnya ekonomi kelembagaan khususnya identifikasi pusat pertumbuhan wilayah dan *hinterland*.

Ekonomi kelembagaan mengacu pada peran kelembagaan yang mencakup aturan, kebijakan, dan struktur kelembagaan yang mempengaruhi kinerja ekonomi suatu wilayah.

Pusat pertumbuhan adalah area yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Identifikasi pusat pertumbuhan melibatkan analisis wilayah yang memiliki infrastruktur, aksesibilitas, dan sumber daya yang dapat mendorong aktivitas ekonomi. Kota Yogyakarta dan sekitarnya sering kali menjadi pusat pertumbuhan utama karena keberadaan berbagai fasilitas, institusi pendidikan tinggi, dan konektivitas transportasi.

*Hinterland* adalah area yang mendukung pusat pertumbuhan dengan menyediakan bahan mentah, tenaga kerja, dan pasar untuk produk akhir. Identifikasi *hinterland* penting untuk memahami hubungan timbal balik antara pusat wilayah dan *hinterland* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Wilayah *hinterland* di sekitar Yogyakarta meliputi kabupaten seperti Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul, yang secara ekonomis bergantung pada interaksi dengan Kota Yogyakarta.

Kelembagaan memainkan peran krusial dalam menentukan efektivitas hubungan antara pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland*. Kebijakan yang baik dan efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang melalui:

- a) **Pengembangan Infrastruktur:** Investasi infrastruktur yang memadai di wilayah *hinterland* dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, yang pada gilirannya mendukung aktivitas ekonomi di pusat pertumbuhan.

- b) **Kebijakan Pelatihan dan Pendidikan:** Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan di wilayah *hinterland* dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil, yang dibutuhkan oleh industri di pusat pertumbuhan.
- c) **Kebijakan Insentif Ekonomi:** Insentif ekonomi seperti keringanan pajak dan subsidi dapat merangsang investasi di wilayah *hinterland*, sehingga mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi.

**Hadirin yang saya hormati,  
Aspek Ekonomi Syariah**

### **5. Peran Kelembagaan dalam Ekonomi Syariah**

#### **a. Ekonomi Kelembagaan dan Akuntabilitas Wakaf: Model Pembiayaan Tanah Wakaf untuk Kesejahteraan Ekonomi Umat**

Ekonomi kelembagaan dalam model pembiayaan tanah wakaf ditujukan sebagai kesejahteraan umat. Seperti yang dijelaskan oleh Surah Al-Baqarah ayat 261 bahwa keutamaan yang diperoleh dari seorang muslim apabila melakukan infaq *fii sabilillah*. Wakaf memang termasuk dalam infaq *fi sabilillah* yakni menyedekahkan harta benda di jalan Allah.

Mewakafkan harta benda untuk disimpan sebagai amanah dan digunakan untuk tujuan amal atau keagamaan, telah lama berfungsi sebagai alat sosial-ekonomi yang penting di negara-negara Muslim. Alam dan Rashid (2011) berpendapat bahwa lembaga wakaf memastikan sumber daya keuangan yang berkelanjutan untuk berbagai manfaat masyarakat, mulai dari sekolah dan rumah sakit hingga sistem dukungan sosial.

Pengelolaan wakaf agar efektif harus mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi modern, terutama dalam ekonomi kelembagaan (Priyadi & Achiria, 2022).

Ekonomi kelembagaan berkenaan dengan pemahaman peran lembaga, peraturan, norma, dan regulasi yang mengatur interaksi ekonomi dalam membentuk perilaku ekonomi. Lembaga memengaruhi biaya transaksi, hak milik, dan mekanisme tata kelola. Douglass North (1991) tentang perubahan kelembagaan menekankan peran penting yang dimainkan lembaga dalam kinerja ekonomi. Implementasi kelembagaan dalam wakaf mengeksplorasi pengaturan kelembagaan dengan baik akan meningkatkan kemanjuran dan akuntabilitas pengelolaan tanah Wakaf.

### **b. Biaya Transaksi dan Pembiayaan Tanah Wakaf**

Salah satu prinsip utama ekonomi kelembagaan adalah biaya transaksi yang menunjukkan biaya pengeluaran dalam pertukaran atau menegakkan kontrak. Dalam konteks Wakaf, biaya ini dapat mencakup biaya hukum, biaya administrasi, dan biaya yang terkait dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Priyadi et al., 2023). Pengelolaan model pembiayaan tanah wakaf yang efektif harus bertujuan untuk meminimalkan biaya transaksi.

### **c. Hak Milik (*Property Right*) dalam Wakaf**

Hak milik yang ditetapkan dengan baik sangat penting untuk alokasi sumber daya yang efisien (Coase, 1960). Dalam konteks wakaf, hak milik dapat menjadi sangat rumit karena sifat unik tanah wakaf dianggap sebagai suatu harta atau benda yang tertahan sehingga

dapat dikelola untuk kemanfaatan ummat yang berkelanjutan.

Pembatasan hak milik yang jelas membantu menghindari perselisihan atas kepemilikan, penggunaan, dan manfaat yang diperoleh dari properti wakaf. Lembaga yang terlibat dalam pengelolaan Wakaf harus memastikan bahwa hak dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan mutawalli (wali amanat), penerima manfaat, dan otoritas regulasi didefinisikan dan ditegakkan dengan jelas. Kegagalan untuk melakukan pengelolaan dapat menyebabkan pemanfaatan tanah wakaf tidak efisien, sehingga mengurangi potensi manfaat ekonominya.

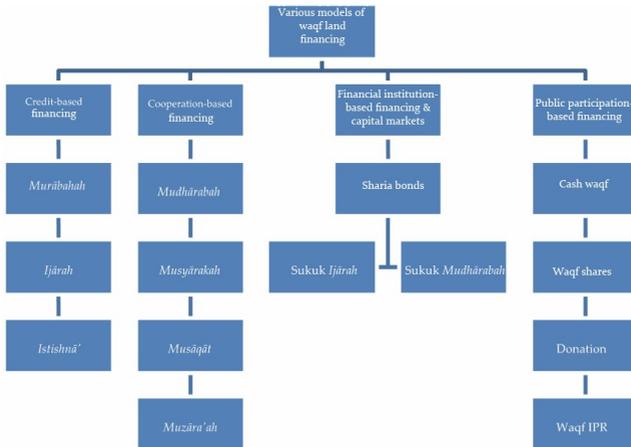
#### **d. Tata Kelola dan Akuntabilitas**

Mekanisme tata kelola dalam pengelolaan wakaf berkaitan dengan bagaimana keputusan penggunaan aset wakaf. Tata kelola yang efektif memerlukan kerangka akuntabilitas yang memastikan para wali amanat bertindak demi kepentingan terbaik tujuan wakaf.

Berdasarkan konsep struktur tata kelola (Williamson 1998), lembaga wakaf dapat memperoleh manfaat dari penerapan model tata kelola hierarki dan berbasis pasar, yang disesuaikan kebutuhan spesifik. Transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui audit rutin, tinjauan kinerja, dan keterlibatan pemangku kepentingan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menyelaraskan insentif wali amanat dengan tujuan wakaf yang lebih luas, pengaturan kelembagaan dapat memastikan bahwa aset wakaf dikelola secara lebih efektif (Priyadi et al., 2023).

### e. Model Pembiayaan yang Efektif

Berbagai model pembiayaan dapat digunakan untuk meningkatkan penggunaan produktif tanah Wakaf, masing-masing memiliki implikasi tersendiri terhadap biaya transaksi, hak properti, dan tata Kelola (Priyadi & Achiria, 2022).



Gambar 1. Model Pembiayaan Tanah Wakaf

### f. Musyarakah (Kemitraan)

*Musyarakah* melibatkan kemitraan di mana semua mitra menyumbang modal dan berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan rasio yang disepakati. Model ini dapat digunakan secara efektif dalam pengembangan tanah wakaf melalui kemitraan antara lembaga wakaf dan investor swasta.

Sifat kepemilikan bersama dan pembagian keuntungan dari *Musyarakah* dapat mengarah pada penyelarasan kepentingan yang lebih baik dan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Dengan

mendefinisikan hak milik dan ketentuan keterlibatan secara jelas, lembaga wakaf dapat menarik modal swasta sekaligus memastikan bahwa proyek pembangunan selaras dengan tujuan amal wakaf.

**g. *Murabahah* (Pembiayaan Biaya-Plus)**

*Murabahah* melibatkan penjualan barang dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Model ini dapat digunakan untuk membiayai proyek wakaf dengan memungkinkan lembaga memperoleh aset atau layanan yang diperlukan dengan pembayaran yang ditangguhkan.

Kesederhanaan dan transparansi transaksi *Murabahah* dapat mengurangi biaya transaksi. Namun, lembaga harus mengelola kewajiban kontraktual dengan hati-hati dan memastikan kepatuhan terhadap pedoman syariah untuk mencegah perselisihan dan inefisiensi.

**h. *Ijarah* (Sewa)**

*Ijarah* melibatkan penyewaan aset untuk jangka waktu tertentu dan menerima pendapatan sewa sebagai imbalannya. Lembaga wakaf dapat menggunakan *Ijarah* untuk menyewakan properti wakaf kepada perusahaan atau individu, menghasilkan aliran pendapatan yang stabil.

Tata kelola dan akuntabilitas yang efektif sangat penting dalam model *Ijarah* untuk memastikan bahwa properti yang disewa dipelihara dengan baik dan digunakan dengan cara yang konsisten dengan tujuan wakaf. Kontrak sewa yang jelas yang menguraikan hak dan tanggung jawab semua pihak dapat membantu mengurangi potensi konflik

### **i. Sukuk (Obligasi Syariah)**

Sukuk dapat diterbitkan oleh lembaga wakaf untuk mengumpulkan dana bagi proyek pembangunan skala besar di tanahwakaf. Instrumen keuangan Islam ini merupakan kepemilikan atas suatu aset atau hak guna pakainya dan menyediakan cara bagi investor untuk memperoleh keuntungan sambil berkontribusi pada wakaf.

Regulasi yang tepat dan pelaporan yang transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap sukuk. Dengan mengadopsi praktik terbaik internasional dalam penerbitan dan tata kelola sukuk, lembaga wakaf dapat menarik basis investor yang lebih luas dan mengakses modal yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan yang signifikan.

### **j. Ekonomi Kelembagaan dan Risiko Pembiayaan Institusi Perbankan**

Ekonomi Kelembagaan berperan penting dalam menyelidiki faktor-faktor yang memengaruhi risiko kredit pada institusi bank pembiayaan rakyat berbasis syariah di Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 dalam memberikan panduan penting yang dapat digunakan oleh institusi perbankan untuk meningkatkan keamanan dan keadilan dalam operasi mereka. Penerapan prinsip-prinsip dalam ayat ini dapat membantu mengurangi risiko pembiayaan dan mendukung sistem ekonomi yang lebih stabil dan adil. Hal ini karena bank-bank pembiayaan rakyat syariah memainkan peran krusial dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan yang kurang terlayani, hal ini dituangkan dalam penelitian

## berjudul **Determinants of Credit Risk of Indonesian Sharia Rural Banks** (Priyadi, Utami, et al., 2021).

Variables	ECM regression Case 2: restricted constant and	
	no trend	Coefficient
D(NPF(-1))	-0.247377	0.0126***
D(INF)	-0.245595	0.0015***
D(INF(-1))	0.352704	0.0002***
D(INF(-2))	-0.150658	0.1081
D(INF(-3))	0.305944	0.0002**
D(CAR)	-0.003615	0.9362
D(CAR(-1))	-0.117786	0.0224**
D(CAR(-2))	-0.096642	0.0433**
D(CAR(-3))	-0.118587	0.0064***
D(PLS)	0.378112	0.0303**
D(PLS(-1))	-0.696637	0.0001***
CointEq(-1)*	-0.124078	0.0003***

Notes:  $p < 0.10$ ; \* $p < 0.05$ ; \*\* $p < 0.01$ ; \*\*\* $p < 0.001$  Source: Authors' own

**Sumber: Priyadi, et.al (2021)**

**Tabel 4.** Hasil Estimasi *Error Correction Model (ECM)*

Pentingnya penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menyediakan peta jalan guna meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan bank syariah di Indonesia. Ketahanan finansial dalam masyarakat pedesaan merupakan landasan bagi stabilitas ekonomi yang lebih luas, dan memastikan bahwa bank-bank ini dapat mengelola risiko kredit secara efektif sangatlah penting. Beberapa wawasan dan rekomendasi utama dari penelitian ini meliputi:

1. Faktor Makroekonomi
2. Faktor Khusus Bank
3. Faktor Spesifik Peminjam
4. Strategi Manajemen Risiko

### **k. Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Lembaga Keuangan Mikro Syariah beroperasi berdasarkan keadilan dan keseimbangan, tanpa eksploitatif seperti sistem riba. Seperti yang dijelaskan

dalam Surah Al-Baqarah ayat 279 menegaskan pentingnya menjauhi riba dan kebijakan ekonomi yang adil, yang menjadi landasan penting dalam pembentukan dan operasionalisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Lembaga Keuangan Mikro berperan sebagai katalisator utama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang kurang terakses oleh layanan perbankan konvensional. Dalam konteks keuangan Islam, Lembaga Keuangan Mikro Syariah tidak hanya berfokus pada penyediaan akses keuangan, tetapi juga mengintegrasikan aspek etika ke dalam operasionalnya, dengan tujuan mencapai kesejahteraan sosial yang lebih luas (Priyadi, 2018).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip fundamental dalam keuangan Islam, yaitu pembagian risiko, investasi yang etis, dan peningkatan kesejahteraan sosial (Achiria & Priyadi, 2019). Prinsip-prinsip ini tercermin dalam larangan terhadap bunga (riba), pencegahan perilaku spekulatif (gharar), serta dorongan untuk inisiatif yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Landasan teoritis ini menegaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan inklusif, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Dalam praktiknya, Lembaga Keuangan Mikro Syariah menggunakan berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah diantaranya: Priyadi, (2018)

1. *Murabahah* (Pembiayaan Biaya-Plus)
2. *Ijarah* (Sewa)
3. *Qard Al-Hasan* (Pinjaman Kebajikan)

Implementasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah menunjukkan dampak signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui penyediaan layanan keuangan yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial-ekonomi. Lembaga Keuangan Mikro Syariah mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang inklusif. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah membantu dalam mendukung kegiatan kewirausahaan, meningkatkan literasi keuangan, serta memperkuat kohesi sosial. Semua ini pada akhirnya berkontribusi pada ketahanan ekonomi masyarakat yang lebih kuat (Unggul Priyadi, 2020).

Meskipun memiliki potensi besar, Lembaga Keuangan Mikro Syariah juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan utama meliputi keterbatasan akses terhadap modal, kendala hukum, dan kompleksitas operasional. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini diperlukan dukungan kebijakan yang terstruktur, pengembangan kapasitas internal lembaga, serta inovasi dalam pemberian layanan keuangan. Seperti kerjasama dengan lembaga keuangan yang lebih besar atau institusi pemerintahan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah akses modal (Priyadi et al., 2024). Oleh sebab itu, keuangan mikro syariah merupakan pendekatan transformatif dari kaca mata ekonomi kelembagaan dalam menciptakan inklusi keuangan yang etis dan berkelanjutan.

**Hadirin yang saya hormati,**

## **6. Kesimpulan**

Kelembagaan memegang peranan yang sangat penting dalam era transformasi global dan ekonomi syariah. Kelembagaan tidak hanya menjadi tulang

panggung stabilitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tingkat kemakmuran dan keadilan yang tinggi.

Pada aspek ekonomi syariah, peran kelembagaan sangat bermakna, khususnya dalam pengelolaan wakaf, yang menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan aset wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan kegiatan ekonomi, sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kelembagaan yang akuntabel dalam pengelolaan wakaf memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam perbankan syariah, institusi memainkan peran dalam pengelolaan risiko pembiayaan dengan dukungan terciptanya kelembagaan yang kuat dan efektif. Perbankan syariah sangat mutlak untuk memiliki sistem pengawasan dan manajemen risiko yang mampu menangani ketidakpastian dan menjaga stabilitas finansialnya. Kelembagaan yang baik dalam perbankan syariah berfungsi sebagai penopang untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat dipercaya oleh nasabah.

Pada lembaga keuangan mikro syariah, kelembagaan memiliki fungsi dalam memberikan akses keuangan kepada kelompok masyarakat yang kurang terlayani oleh bank konvensional. Teori kelembagaan yang diterapkan pada lembaga keuangan mikro syariah mencakup pengembangan aturan dan mekanisme yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pada aspek sektor pertanian, kelembagaan mencakup berbagai hal, mulai dari regulasi yang mengatur aktivitas pertanian, hingga lembaga-lembaga

yang menyediakan dukungan dan layanan kepada petani. Kelembagaan yang kuat dalam sektor pertanian memastikan bahwa petani mendapatkan akses ke pasar, teknologi, dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Selain itu, kelembagaan juga berperan dalam meminimisasi tantangan degradasi lahan dan ketersediaan pangan.

Pada sektor pariwisata memerlukan kelembagaan yang efektif untuk mengelola dan mengembangkan destinasi wisata, memperkuat *branding*, menjaga kearifan lokal serta memastikan keberlanjutan lingkungan. Penguatan kelembagaan di sektor ini melibatkan pengembangan standar layanan, promosi, serta regulasi yang mendukung pariwisata berkelanjutan. Kelembagaan yang baik dalam pariwisata juga membantu dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan penghasilan masyarakat lokal melalui sektor ekonomi kreatif.

Kelembagaan juga mempunyai peranan signifikan dalam mendukung ekonomi regional dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Kelembagaan yang solid pada tingkat regional memastikan bahwa terdapat koordinasi yang baik antara kebijakan pusat dan daerah, serta antara pemerintah dan sektor swasta. Kelembagaan mendukung penciptaan infrastruktur yang memadai, pengembangan sumber daya manusia, dan penyediaan layanan publik yang berkualitas. Hal ini merupakan elemen kunci untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, kelembagaan yang kuat dan efektif adalah kunci untuk mencapai kemakmuran dan keadilan dalam transformasi ekonomi global dan ekonomi

syariah. Paparan ini menegaskan bahwa kelembagaan berfungsi sebagai pilar yang sangat penting dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk ekonomi syariah, pertanian, pariwisata, dan dalam konteks ekonomi regional serta pembangunan ekonomi. Melalui penguatan kelembagaan, kita dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan, yang membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu, pengembangan dan penguatan kelembagaan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi, agar tujuan kemakmuran dan keadilan dapat tercapai dan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi secara keseluruhan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan Terima Kasih atas semua perjalanan mengarungi kehidupan khususnya dalam mencapai jabatan akademik Professor. Dalam proses pencapaian Guru Besar banyak sekali dukungan dari semua pihak yang tidak terlepas dari rahmat dan hidayah Allah Swt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah V yang telah memproses, mengawal dan mengusulkan kenaikan jabatan Guru Besar saya. Juga Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah memproses dan menyetujui serta mengeluarkan SK Guru Besar. Terimakasih kami ucapkan kepada Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan Badan Wakaf, Rekor dan Wakil-wakil Rektor Universitas Islam Indonesia. Dekan dan Wakil-wakil Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika.

Terima kasih juga kepada bagian pimpinan dan segenap staf pada Direktorat SDM UII khususnya SDM FBE Mas Jatiantoro dan Mas Sigit yang telah banyak

membantu pengelolaan data-data usulan Guru Besar. Dosen-dosen senior yang masih aktif di FBE, Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.; Drs. Suwarsono, M.A.; Drs. Muqodim, M.BA.Ak. dan rekan-rekan dosen FBE umumnya dosen-dosen di lingkungan UII.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan SMP, SMA, S1, S2, dan S3 yang sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk hadir di acara pidato ilmiah ini. Serta para hadirin yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga untuk kedua orang tua saya yang telah berpulang ke Rahmatullah semoga ditempatkan terbaik disisi Allah Swt., yang semasa hidupnya telah mengorbankan materi dan bimbingan spiritual dengan tulus dan Ikhlas. Terima kasih juga kepada sembilan bersaudara kandung, keluarga besar Bapak Jarkonidin dan keluarga besar Bapak Sartono beserta keluarga besar istri saya yang senantiasa mensupport dalam meniti karir sebagai dosen.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga saya sampaikan kepada istri saya Tatik Ekorini yang sampai hari ini masih sakit sehingga pada kesempatan ini tidak bisa menikmati kebahagiaan bersama kita semua, semoga Allah Swt. memberi yang terbaik untuk istri saya. Ananda Ferdista dan istri serta cucu tercinta Keenan dan Kanaya yang selalu memberikan *support* lahir dan batin kepada saya untuk berkarya sehingga bisa menjadi guru besar dan merawat istri.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

## DAFTAR PUSTAKA

- Achiria, S., & Priyadi, U. (2019). Studi Komparasi Pengelolaan Dana Wakaf di KSPPS BMT Daerah Istimewa Yogyakarta. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2), 229–241. <https://doi.org/10.24090/MNH.V13I2.2973>
- Coase, R. H. (1960). The Problem of Social Cost. *Classic Papers in Natural Resource Economics*, 87–137. [https://doi.org/10.1057/9780230523210\\_6](https://doi.org/10.1057/9780230523210_6)
- Mohamed, H., Mirakhor, A., & Erbaş, S. N. (2019). Economic and Institutional Applications. *Belief and Rule Compliance*, 143–165. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813809-0.00007-2>
- Nordin, S. M., Rizal, A. R. A., Rashid, R. A., Che Omar, R., & Priyadi, U. (2021). Incidents and Disaster Avoidance: The Role of Communication Management and the Organizational Communication Climate in High-Risk Environments. *Sustainability 2021, Vol. 13, Page 10138*, 13(18), 10138. <https://doi.org/10.3390/SU131810138>
- North, D. C. (1991). Institutions. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97–112. <https://doi.org/10.1257/jep.5.1.97>
- Priyadi, U. (1994). Mengoptimalkan peranan sektor pariwisata dalam penerimaan devisa dan sebagai instrumen mengentaskan kemiskinan. *Economic Journal of Emerging Markets*, 46–54. <https://doi.org/10.20885/EJEM.V4I1.6618>
- Priyadi, U. (2008). Peranan Inovasi Kelembagaan Pabrik Gula Madukismo Terhadap Pelaksanaan Usahatani

- Tebu di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Economic Journal of Emerging Markets*.  
<https://doi.org/10.20885/EJEM.V13I2.226>
- Priyadi, U., & Achiria, S. (2022). Social Enterprise Model in Waqf Land Management in Bantul, Indonesia. *Millah: Journal of Religious Studies*, 21(3), 891–914.  
<https://doi.org/10.20885/MILLAH.VOL21.ISS3.ART10>
- Priyadi, U., Achiria, S., & Adli, A. I. H. (2024). Optimalisasi Layanan Nazhir Berbasis Digital pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Bantul. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 5(2), 248–255.  
<https://doi.org/10.33394/JPU.V5I2.10360>
- Priyadi, U., Achiria, S., Imron, M. A., & Zandi, G. R. (2023). Waqf management and accountability: Waqf land financing models for economic wellbeing. *Asian Economic and Financial Review*, 13(1), 74–84. <https://doi.org/10.55493/5002.V13I1.4696>
- Priyadi, U., & Atmadji, E. (2017). IDENTIFIKASI PUSAT PERTUMBUHAN DAN WILAYAH HINTERLAND DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *AJIE (Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship)*, 2(02), 193–219. <https://journal.uii.ac.id/ajie/article/view/8211>
- Priyadi, U., Atmadji, E., Artiani, L. E., Nordin, S. M., Abdullah, M. R. T. L., Imron, M. A., Wildan, M. A., & Omar, R. C. (2022). Sustainable Energy Economic Policy: Population, Energy Consumption, and Macroeconomic Conditions. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 12(6), 80–85. <https://doi.org/10.32479/IJEEP.13578>

- Priyadi, U., Saddam Ash Shidiqie, J., Lak Nazhat H, L. E., Md Nordin, S., & Ali Imron, M. (2021). International Journal of Economics and Financial Issues With-without Privilege Funds: Allocative Efficiency and Local Growth Welfare. *International Journal of Economics and Financial Issues* |, 11(5), 2021. <https://doi.org/10.32479/ijefi.8884>
- Priyadi, U., & Shidiqie, J. S. A. (2015). PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN LAHAN SAWAH: Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Millah: Journal of Religious Studies*, 15(1), 101–116. <https://doi.org/10.20885/MILLAH.VOL15.ISS1.ART5>
- Priyadi, U., Shidiqie, J. S. A., Nazhat, E. H. L. L., & Imron, M. A. (2021). WITH-WITHOUT PRIVILEGE FUNDS: ALLOCATIVE EFFICIENCY AND LOCAL GROWTH WELFARE. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 11(5), 122–126. <https://doi.org/10.32479/IJEFI.8884>
- Priyadi, U., Utami, K. D. S., Muhammad, R., & Nugraheni, P. (2021). Determinants of credit risk of Indonesian Shari'ah rural banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(3), 284–301. <https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2019-0134/FULL/HTML>
- Priyadi, Unggul. (2016). *Pariwisata syariah : prospek dan perkembangan*. 206.
- Priyadi, Unggul. (2018). *Teori dan aplikasi lembaga keuangan mikro syariah*. 166.

- Robinson, J., & Acemoglu, D. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Random House.
- Siti Achiria, U. P. (2022). *MODEL PENGELOLAAN ASET TANAH WAKAF BERBASIS SOCIAL ENTERPRISE*. UII Press.
- Tarjo, T., Anggono, A., Zakik, Z., Nordin, S. M., & Priyadi, U. (2024). The impact of Islamic of corporate social responsibility on social welfare with financial fraud as moderating: study in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 31(5), 1190–1207. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2023-0008/FULL/XML>
- The Prize in Economic Sciences 2024 - Press release - NobelPrize.org*. (n.d.). Retrieved December 13, 2024, from <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2024/press-release/>
- Unggul Priyadi. (2014). *Retrospeksi Industri Gula Nasional: Pendekatan Teoritis dan Empirik*. UII Press.
- Unggul Priyadi. (2020). *Manajemen Perbankan Syariah*. 82.
- Williamson, O. E. (1998). Transaction cost economics: How it works; where it is headed. *Economist*, 146(1), 23–58. <https://doi.org/10.1023/A:1003263908567/METRICS>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Prof. Dr. Unggul Priyadi, M.Si.**

### IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap	Prof. Dr. Unggul Priyadi, M.Si.
Tempat dan Tanggal Lahir	Banjarnegara, 18 September 1962
Jenis Kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Status Perkawinan	Menikah
NIP/NIK	883130101
NIDN	0518096201
Golongan/Pangkat	IV b / Pembina Tk. 1
Jabatan Fungsional	Guru Besar
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Indonesia
Alamat	Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Jl. Ring Road Utara, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telp./Fax	Telp (0274) 881546 – Fax (0274) 882589

Alamat Rumah	Jl. Werkudara RT 02 / RW 08 Nomor 38 Kragilan Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
Telp./HP/Fax	0274 624125/081333531611
Alamat e-mail	<a href="mailto:883130101@uii.ac.id">883130101@uii.ac.id</a> dan <a href="mailto:priyadi.unggul@yahoo.com">priyadi.unggul@yahoo.com</a>

## RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Lulus	Program Pendidikan	Perguruan Tinggi	Program Studi
1987	Sarjana	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	Ilmu Ekonomi
1996	Magister	IPB	Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
2008	Doktor	Universitas Brawijaya, Malang	Ilmu Ekonomi (Studi Pembangunan)

## SERTIFIKASI PROFESI

No	Jenis Sertifikasi Profesi (Dalam Negeri)	Penyelenggara	Tahun
1	Kursus Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Tipe A)	Pusat Penelitian Lingkungan Hidup-Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro (2003)	2003
2	Kursus Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Tipe C)	Pusat Studi Lingkungan Hidup-Universitas Gadjah Mada (2003)	2003
3	Sertifikasi Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan. No sk 056.serdos-uksw.I.2009	Universitas Kristen Satya Wacana	2009

4.	Sertifikasi Asesor Kompetensi	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	2018
5.	Sertifikasi Kompetensi Penulisan Buku Non Fiksi	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	2019
6.	Sertifikasi Substansif (Editor Buku)	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	2019

### **Jabatan dalam Pengelolaan Institusi**

No	Peran/Jabatan & Institusi	Tahun
1	Direktur PPE FBE UII	1994
2	Staf Ahli Kantor perbendaharaan BW	1998
3	Kepala UII Press	2010-2014
4	Ketua Pusat Pengabdian Masyarakat DPPM UII	2018-2022

### **HAK CIPTA**

No	Jenis Hak Cipta	Judul	Tahun
1	Buku	Retrospeksi Industri Gula Nasional: Pendekatan Teoritis dan Empirik	15 Agustus 2014 No Pencatatan: 076339
2	Buku	Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan	1 Desember 2016 No Pencatatan: 02522
3	Buku	Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah	30 April 2018 No Pencatatan: 000141116
4	Buku	Bank dan Lembaga Keuangan Syariah	1 Februari 2019 No Pencatatan: 000228677

5	Buku	Manajemen Perbankan Syariah	1 Februari 2020 No Pencatatan: 000228676
6	Buku	Model Pengelolaan Aset Tanah Wakaf Berbasis Social Enterprise	1 Maret 2022 No Pencatatan: 000331104

## PENGALAMAN MENGAJAR

<b>Mata Kuliah</b>	<b>Program Pendidikan</b>	<b>Institusi/ Program Studi</b>	<b>Tahun Akademik</b>
Ekonomi Pengantar	Sarjana	Universitas Islam Indonesia/Ekonomi Pembangunan	2020/2021 Ganjil
Ekonomika Kelembagaan	Sarjana	Universitas Islam Indonesia/Ekonomi Pembangunan	2020/2021 Ganjil
Ekonomika Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Sarjana	Universitas Islam Indonesia/Ekonomi Pembangunan	2020/2021 Ganjil
Ekonomi Keuangan Islam	Magister	Universitas Islam Indonesia/Ekonomi Pembangunan	2020/2021 Ganjil
Manajemen dan Perencanaan Kekayaan	Magister	Universitas Islam Indonesia/Ekonomi Pembangunan	2020/2021 Ganjil
Ekonomi Manajerial	Magister	Universitas Islam Indonesia/Ekonomi Pembangunan	2020/2021 Ganjil
Ekonomika Makro Menengah	Sarjana	Universitas Islam Indonesia/Ekonomi Pembangunan	2020/2021 Genap
Metodologi Penelitian Ekonomi	Sarjana	Universitas Islam Indonesia/Ekonomi Pembangunan	2020/2021 Genap

Ekonomi Kelembagaan dan Kebijakan Publik	Doktor	Universitas Islam Indonesia/Ekonomi Pembangunan	2020/2021 Genap
Kuangan Manajerial dan Kebijakan Publik	Magister	Universitas Islam Indonesia/Ekonomi Pembangunan	2021/2022 Ganjil
Manajemen Kekayaan Syariah	Magister	Universitas Islam Indonesia/Ekonomi Pembangunan	2021/2022 Ganjil
Ekonomi Islam	Sarjana	Universitas Islam Indonesia/Manajemen	2021/2022 Genap
Ekonomi Mikro Pengantar	Sarjana	Universitas Islam Indonesia/Ekonomi Pembangunan	2022/2023 Ganjil
Kebijakan Strategi Untuk Sektor Publik	Doktor	Universitas Islam Indonesia/Ekonomi Pembangunan	2022/2023 Ganjil
Ekonomi Mikro Terapan	Magister	Universitas Islam Indonesia/Ekonomi Pembangunan	2022/2023 Ganjil
Statistika Untuk Bisnis	Sarjana	Universitas Islam Indonesia/Manajemen	2022/2023 Pendek
Mikroekonomi	Sarjana	Universitas Islam Indonesia/Ekonomi Islam	2023/2024 Ganjil
Kajian Empirik Kebijakan Publik	Doktor	Universitas Islam Indonesia/Ekonomi Pembangunan	2023/2023 Ganjil
Ekonomika Makro Lanjutan	Sarjana	Universitas Islam Indonesia/Ekonomi Pembangunan	2023/2024 Genap

Ekonomi Pembangunan Islam	Sarjana	Universitas Islam Indonesia/Ekonomi Islam	2022/2023 Ganjil
Desain Inovasi Sosial dan Keuangan Mikro	Magister	Universitas Islam Indonesia/Ekonomi Pembangunan	2023/2024 Ganjil
Kajian Pustaka Sistematis Kebijakan Publik	Doktor	Universitas Islam Indonesia/Ekonomi Pembangunan	2023/2024 Ganjil
Ekonomi Pembangunan	Sarjana	Universitas Islam Indonesia/Ekonomi Pembangunan	2023/2024 Genap
Kebijakan Perencanaan dan Pembangunan	Sarjana	Universitas Islam Indonesia/Ekonomi Pembangunan	2023/2024 Ganjil

## PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2014	Penyusunan Model Desa Wisata Berbasis Syariah Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (Hibah Penelitian DIKTI)	Ketua Tim	DIKTI
2020	Efisiensi Sumber Pembiayaan Luar Negeri Negara Anggota ASEAN; Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia, Vietnam, Kamboja dan Laos (Hibah Penelitian Kerjasama)	Ketua Tim	UII
2019	Analisis Kinerja Pabrik Madubaru Perspektif Kelembagaan Dalam	Ketua Tim	FBE UII

	Mewujudkan Swasembada Gula (Hibah Penelitian Jurusan)		
2019	Analisis Arus Modal Pada Era Perubahan Otoritas Batam Menjadi Badan Pengusahaan Batam (Hibah Penelitian PPE)	Ketua Tim	PPE FBE UII
2019	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Kota Batam (Hibah Penelitian PPE)	Ketua Tim	PPE FBE UII
2020	Peningkatan Kualitas Produk UKM Makanan Ringan Slondok Bu Murti Di Dusun Sanggrahan Desa Tlogoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (Hibah Penelitian Fakultas)	Ketua Tim	FBE UII
2021	Penentuan Biaya Transaksi Ternak Sapi Secara Kandang Kelompok dan Ternak Sapi Mandiri (Hibah Penelitian PPE)	Ketua Tim	PPE FBE UII
2021	Peranan Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul (Hibah Penelitian PPE)	Ketua Tim	PPE FBE UII
2021	Dampak Covid-19 Terhadap Aktivitas Pariwisata Kota Lama Semarang Dalam Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat (Hibah Penelitian PPE)	Ketua Tim	PPE FBE UII
2021	Model Pengembangan Wakaf Berbasis <i>Social Enterprise</i> Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bantul Diy (Hibah Penelitian DIKTI)	Ketua Tim	DIKTI

2023	Integrasi Pasar Dan Elastisitas Transmisi Harga Garam Di Kabupaten Pati Jawa Tengah (Hibah Internal Jurusan Ilmu Ekonomi)	Ketua Tim	Jurusan Ilmu Ekonomi
2023	Analisis Pusat Pertumbuhan Wilayah Dan <i>Hinterland</i> Di Kabupaten Bantul (Hibah Penelitian PPE)	Ketua Tim	PPE FBE UII
2024	Analisis Perilaku Impulsif Pembayaran <i>Paylater</i> Pada Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (Hibah Penelitian PPE)	Ketua Tim	PPE FBE UII
2024	Analisis Pusat Pertumbuhan Wilayah Dan <i>Hinterland</i> Di Kabupaten Kulonprogo (Hibah Penelitian PPE)	Ketua Tim	PPE FBE UII
2024	An Economic Lens On Policy Quality And Political Stability: Exploring Their Impact On Foreign Direct Investment In Asean Countries (Hibah Penelitian Fakultas)	Ketua Tim	UII

## PENGALAMAN PENGABDIAN

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2014	Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Syariah Pada Agro Wisata Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Turi Sleman	Ketua Tim	Internal UII
2016	Pendayagunaan Hasil Pertanian dan Peternakan melalui Diversifikasi Produk Makanan dalam UMKM Berbasis Bahan Pangan Lokal (Hibah Pengabdian DIKTI)	Ketua Tim	DIKTI

2018	Pelatihan Pengolahan Ikan Menjadi Makanan Siap Konsumsi (Hibah Pengabdian DPPM)	Ketua Tim	DPPM UII
2018	Pemberdayaan Masyarakat Di Sentra Batik Pandowoharjo Kabupaten Sleman Melalui Peningkatan Kapasitas SDM Dan Pemasaran (Hibah Pengabdian DPPM)	Ketua Tim	DPPM UII
2019	Pengembangan Desa Wisata Benowo, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah (Hibah Pengabdian DIKTI)	Ketua Tim	DIKTI
2022	Penerapan Wisata Sehat Di Desa Wisata Pulewulung Bangunkerto, Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Di Masa Pandemi Covid-19 (Hibah Pengabdian DPPM)	Ketua Tim	PPE FBE UII
2022	Pengembangan Aset Tanah Wakaf Melalui Budidaya Ikan Lele Berbasis Bioflok Di Desa Argodadi Dusun Brongkol Kecamatan Sedayu (Hibah Pengabdian DPPM)	Ketua Tim	DPPM UII
2023	Peningkatan Layanan Nazhir Berbasis Digital Pada Perwakilan BWI Kabupaten Bantul (Hibah Pengabdian DPPM)	Ketua Tim	DPPM UII
2023	Pemberdayaan Aset Tanah Wakaf Untuk Wisata Sampah Berbasis Inovasi Digital Di Kelurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman (Hibah Pengabdian DPPM)	Ketua Tim	DPPM UII
2024	Digitalisasi Layanan Aset Tanah Wakaf Pada Wakif Di Wilayah Kabupaten Sleman (Hibah Pengabdian DPPM)	Ketua Tim	DPPM UII

## JURNAL PENGABDIAN

No	Judul Karya	Penyelenggara/Penerbit	Tahun
1	Pelatihan Pengolahan Ikan Menjadi Makanan Siap Konsumsi di Desa Argodadi, Sedayu, Bantul, DIY	Prosiding Seminar Nasional seri 8 “Mewujudkan Masyarakat Madani dan Lestari Yogyakarta”	2018
2	Pelatihan Manajemen Masjid di Desa Argodadi, Sedayu, Bantul, Yogyakarta	Prosiding Seminar Nasional seri 8 “Mewujudkan Masyarakat Madani dan Lestari Yogyakarta”	2018
3	Pelatihan Tentang Public Speaking dan Keterampilan Pranta Adicara Dengan Pengantar Bahasa Jawa di Padukuhan Somodaran, Desa Banyuraden, Gamping, Sleman	AJIE – Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship	2018
4	Pengembangan IKM Batik Ayu Arimbi Melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemasaran	Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ, Vol. 7 No.1, Hal: 27-30	2020
5	Pemanfaatan Emping Melinjo Menjadi Olahan Emping Madu Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dusun Makamdowo	Jurnal Dharma Bakti-LPPM IST AKPRIND Yogyakarta	2020
6	Penerapan Wisata Sehat di Desa Wisata Pulewulung Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman	Jurnal Abdimas Madani dan Lestari, Vol. 04, Issues. 02, Hal: 90-95	2022

	Di Masa Pandemi Covid-19		
7	Pengembangan Desa Wisata Benowo, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah	ADARMA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JANABADRA Vol. 9, No. 1	2020
8	Optimalisasi Layanan Nazhir Berbasis Digital pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Bantul	Jurnal Pengabdian LPPM UNDIKMA Vol. 5, No. 2	2024
9	Digitalisasi Layanan Aset Tanah Wakaf Pada Wakif di Wilayah Kabupaten Sleman	ABDIMAS GALUH: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6, No. 2, Hal: 2184-2195	2024
10	Optimization of Organic Waste Management with a Circular Economy Approach: The Case of Food Recycling in Bantul Regency, Indonesia	Jurnal Pengabdian UNDIKMA	2024

## JURNAL NASIONAL AKREDITASI SINTA

No	Judul Karya	Akredit-asi	Penyelenggara/ Penerbit	Tahun
1	Studi Komparasi Pengelolaan Dana Wakaf Di KSPPS BMT Daerah Istimewa Yogyakarta	SINTA 2	Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 13 No 2 (2019) 229-241	2019
2	Perdagangan Kopi Vietnam Dan Indonesia Di Empat Negara Tujuan Ekspor Kopi Utama: Penerapan	SINTA 3	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 19, No.1 FEB UNS	2019

	Model Constant Market Share			
3	The Determinant Factors Of Muzakki Toward Paying Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) In Zakat Institutions	SINTA 3	Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking Vol. 3 No. 2 page:143-158	2020
4	Peran BMT Dalam Mereduksi Praktik Rentenir	SINTA 5	Jurnal Ekonomika dan Bisnis Vol 8 No 01 (2021): Jurnal Ekonomika dan Bisnis 99 - 118	2021
5	OPTIMIZATION OF EMPOWERMENT AND DEVELOPMENT OF VILLAGE ECONOMIC POTENTIAL THROUGH VILLAGE OWNED BUSINESS Entities (BUMDES) (Panggunharjo Kapanewon Sewon, Guwosari Kapanewon Pajangan Village, And Tamantirto Kapanewon Kasihan Village In Bantul Regency)	SINTA 4	International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol 6, No 1 (2022): IJEBAR : Vol. 6, Issue 1, March 2022 430-438	2022
6	Analisis Kesiediaan Membayar Pada Objek Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran Di Daerah Istimewa Yogyakarta	SINTA 4	Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 13, No 1 (2022): Vol 13, No.1 (2022): Oktober 319-332	2022

	Universitas Bandar Lampung (Ubl)			
7	Penerapan Wisata Sehat Di Desa Wisata Pulewulung Bangunkerto, Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Di Masa Pandemi Covid-19	SINTA 4	Jurnal Abdimas Madani dan Lestari (JAMALI) Volume 04, Issue 02, September 2022 90-95	2022
8	Social Enterprise Model In Waqf Land Management In Bantul, Indonesia	SINTA 2	Millah: Journal of Religious Studies Vol. 21, No. 3, August 2022 891-914	2022
9	Pengembangan Aset Tanah Wakaf Melalui Budidaya Ikan Lele Berbasis Bioflok Di Desa Argodadi Kabupaten Bantul DIY	SINTA 4	Jurnal Pengabdian UNDIKMA Vol 4, No 2 (2023): May 316-324	2023
10	Digitalisasi Layanan Aset Tanah Wakaf Pada Wakif Di Wilayah Kabupaten Sleman	SINTA 4	Abdimas Galuh Vol 6, No 2 (2024): September 2024 2184-2195	2024
11	Regional Financial Transformation: Analysis Of The Influence Of Public Funds On Regional Expenditures	SINTA 4	Indonesian Journal of Economics and Management 4 (2), 256-269	2024
12	The Role And Contribution Of The New Institutional Economics In Economic System Performance	SINTA 5	Jurnal Simki Economic Vol 7 No 1 (2024): Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024 271-288	2024

13	Empowering MSMEs: The Role Of Mosques In Community Economic Development	SINTA 2	Shirkah: Journal of Economics and Business Vol 9, No 3 (2024) 397-410	2024
14	Analisis Integrasi Pasar Dan Elastisitas Transmisi Harga Garam Di Kabupaten Pati Jawa Tengah	SINTA 3	Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis 29 (2), 310-321	2024
15	Analysis Of Regional Growth Center And Hinterland In Bantul Regency	SINTA 3	Optimum: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 14 (2), 224-236	2024

## JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI

No	Judul Karya	Indeks	Penyelenggara /Penerbit	Tahun
1	Analysis The Effect Of Internal and External Risk and Ownership Behavior On The Performance Of Sharia Rural Bank (SRB) In Indoensia	EBSCO	Information an International Interdisciplinar y Journal	2018
2	From Enviromental Knowledge to Conservation Behavior	Scopus Q3	SRAC - Romanian Society for Quality Volume 20, Issue 172, October 2019, Pages 101-107	2019
3	Incidents and disaster avoidance: the role of communication management and the organizational	Scopus Q1	MDPI Volume 13, Issue 18, September 2021	2021

	communication climate in high-risk environments			
4	Determinants of credit risk of Indonesian Shari'ah rural banks	Scopus Q2	ISRA International Journal of Islamic Finance, Vol. 13, Issue 3	2021
5	Sustainable Energy Economic Policy: Population, Energy Consumption, and Macroeconomic Conditions	Scopus Q1	International Journal of Energy Economics and Policy Volume 12, Issue 6, 2022, Pages 80-85	2022
6	Cloud Computing Based Computing System for Women's Higher Education in Isolated Areas	Scopus Q3	International Journal of Communication Networks and Information Security Volume 14, Issue 3, 2022, Pages 26-35	2022
7	An Optimal Routing Protocol Using a Multiverse Optimizer Algorithm for Wireless Mesh Network	Scopus Q3	International Journal of Communication Networks and Information Security Volume 14, Issue 3, 2022, Pages 36-46	2022
8	Stakeholders of Yogyakarta Special Region and the Way They Manage Privilege Fund	Scopus Q4	Lecture Notes in Networks and Systems	2023

			Volume 487, 2023, Pages 185-200	
9	Waqf management and accountability: Waqf land financing models for economic wellbeing	Scopus Q2	Asian Economic and Financial Review Volume 13, Issue 1, 2023, Pages 74-84	2023
10	Communicating Sustainable Brand Equity in a High Carbon Footprint and High-Risk Sector: Comparing Malaysia and Indonesia Oil and Gas Industry	Scopus Q1	Sustainability (Switzerland) Volume 15, Issue 10	2023
11	Exploring Corporate Social Responsibility: A Phenomenological Study of Exxon Mobil CEPU CSR Exploration	Scopus Q3	Sifisheries Sciences Vol. 10, Issues 01	2023
12	Digital-Based Nazhir Services for Co-Creation Value in Waqf Land Asset Management	Copernicus	Innovative Research Developers and Publishers (IRDP) Volume 10, Issue 3	2023
13	The impact of Islamic of corporate social responsibility on social welfare with financial fraud as moderating: study in Indonesia	Scopus Q2	Journal of Financial Crime Volume 31, Issue 5, 16 October 2024, Pages 1190- 1207	2024
14	Digital transformation: Artificial intelligence	EBSCO	New Applied Studies in Management,	2024

	shaping the future of public sector		Economics & Accounting Vol. 7, Issue 4, pages: 54-67	
15	The Impact of Policy Quality and Political Stability on Foreign Direct Investment in ASEAN Countries: An Institutional Economics Analysis	Scopus Q2	Journal of Ecohumanism Vol. 3, Issue 6, 31 August 2024, Pages 1561-1572	2024
16	Aligning Public Financial Management with SDGs: Efficient Utilization of Privileged Funds for Enhancing Quality of Life	Scopus Q3	Journal of Lifestyle and SDGs Review Vol. 5, Issue 2	2025

## PEMBICARA & PEMAKALAH DALAM *CONFERENCE*

Tahun	Judul	Penyelenggara
2014	Potensi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Syariah di Kabupaten Sleman	Seminar Nasional Menuju Masyarakat Madani dan Lestari, DPPM UII
2014	Model Penguatan Kapasitas Marketing Produk Industri Kreatif di Kabupaten Sleman dengan Pemanfaatan IT dan Marketing Syariah	Seminar Nasional Menuju Masyarakat Madani dan Lestari, DPPM UII
2018	Agro-ecotourism management in disaster-affected areas	Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference
2018	Pelatihan Pengolahan Ikan Menjadi Makanan Siap Konsumsi di Desa Argodadi, Sedayu, Bantul, D.I.Y	Prosiding Seminar Nasional Seri 8

		“Mewujudkan Masyarakat Madani dan Lestari” Yogyakarta
2018	Pelatihan Manajemen Masjid di Desa Argodadi, Sedayu, Bantul, Yogyakarta	Prosiding Seminar Nasional Seri 8 “Mewujudkan Masyarakat Madani dan Lestari” Yogyakarta
2019	The Implemmentation Potential Of Village Fund in Islamic Economic Perspekstive With The Instrument Of Maqashid Syariah	3th Annual Internasional Seminar and Conference on Global Issue (ISCoGI2017)
2023	ANALISIS TINGKAT PERGESERAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI DI KABUPATEN DEMAK	DPPM UII
2023	Aquaculture Resilience: Empowering Food Security through IoT Based People's Farm Robots	Kne Publishing
2023	INTEGRASI PASAR DAN ELASTISITAS TRANSMISI HARGA IKAN BANDENG DI KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI JAWA TENGAH	DPPM UII

## KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2020	Pembicara pengabdian Masyarakat Hibah Dikti ttg Pengembangan Desa Wisata di Purworejao th 2020, Pengelolaan Makanan di Desa Srimulyo Bantul, Hibah Pengabdian Masyarakat Hibah DPPM: Pengelolaan Wisata	Pulewulung, Sleman

	Sehat desa Wisata Pulewulung Sleman,	
2024	Digitalisasi Layanan Aset Tanah Wakaf Pada Wakif di Wilayah Kabupaten Sleman	BWI Kabupaten Sleman

## PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH

Tahun	Nama Jurnal	Jabatan
2018	Jurnal Abdimas Madani dan Lestari	<i>Editor in Chief</i>

## PENGHARGAAN

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2018	Publikasi Buku Teks Ajar Perguruan Tinggi Bidang Ekonomi Islam dan Ilmu-ilmu Terkait	IAEI
2019	Penyuntingan Substansift (Editor Buku)	BNSP
2019	Penulisan Buku Non Fiksi	BNSP
2021	Peserta Penyamaan Persepsi Beban Kinerja Dosen	APTISI Wilayah V DIY
2023	Sertifikat Reviewer Media Dialektika Ilmu Islam	ADDIN
2023	Sertifikat Peserta Kegiatan Literasi SNI	Universitas Islam Indonesia dan Badan Standardisasi Nasional
2024	Sertifikat Reviewer Hibah Pengabdian Masyarakat Internal DPPM UII	Universitas Islam Indonesia

## BUKU REFERENSI

No	Judul Karya	Penerbit	Tahun
1	Aplikasi Model Multinomial Logistik Pada Pelaksanaan Usaha Tani Tebu	UII Press Yogyakarta	2012
2	Retrospeksi Industri Gula Nasional Pendekatan dan Empirik	UII Press Yogyakarta	2014
3	Reorientasi Ekonomi Syariah	UII Press Yogyakarta	2014
4	Buku Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan	UPP STIM YKPN	2016
5	Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah	UII Press Yogyakarta	2018
6	Pembangunan dan Impelementasi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam	UII Press Yogyakarta	2018
7	Bank dan Lembaga Keuangan Syariah	Universitas Terbuka	2019
8	Manajemen Perbankan Syariah	Universitas Terbuka	2020
9	Aplikasi Akad BMT	UII Press Yogyakarta	2021

## ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

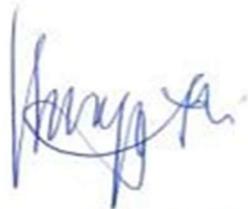
Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang
2016	Masyarakat Ekonomi Syariah	Anggota
2016	Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)	Anggota

## KEANGGOTAAN TIM PENILAI

Tahun	Keterangan
2018	Asesor Kompetensi
2021	<i>Reviewer dan Editor Open Journal System (OJS) Journal Economic Research (JER), Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI</i>
2020	TIM PENGELOLA JURNAL ELETRONIK KEUANGAN UMUM DAN AKUNTANSI TERAPAN TAHUN ANGGARAN 2020, STAN

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Yogyakarta, 11 Februari 2025  
Yang Menyatakan,



**Prof. Dr. Unggul Priyadi, M.Si.**  
**NIDN: 051809620**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**